

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025

RENCANA KERJA

DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

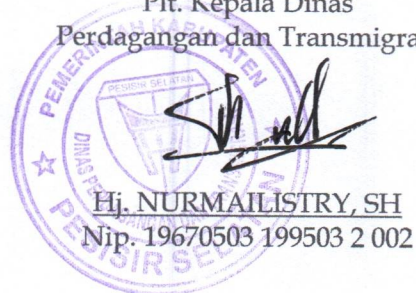
Puji dan syukur kita panjatkan ke Hadirat Allah SWT, atas Rahmat dan KaruniaNya. Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan Dokumen tahunan Rencana Kerja yang telah disusun sebagai panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas dalam jangka waktu satu tahun kedepan pada masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Rencana Kerja ini disusun dengan memperhatikan kebutuhan organisasi dan penyesuaian anggaran dalam rangka mewujudkan kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang lebih optimal.

Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas dan plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Kami menyadari atas kekurangan dan keterbatasan kami, sehingga dalam penyusunan Rencana Kerja OPD (Renja OPD) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mungkin masih terdapat kelemahan, maka kami harapkan koreksi dan masukan penyempurnaan lebih lanjut agar dapat dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi demi terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah

Painan, 5 Agustus 2024
Plt. Kepala Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi



Hj. NURMAILISTRY, SH
Nip. 19670503 199503 2 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Bab I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika	9
Bab. II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Tahun 2023	11
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024	11
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	39
2.3 Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	42
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	68
Bab III Tujuan Dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi	72
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	72
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	74
3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	76
Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	114
Bab V Penutup	119

DAFTAR TABEL

Tabel .2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 Kabupaten Pesisir Selatan	14
Tabel .2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	40
Tabel.2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	46
Tabel 2.4	Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kabupaten Pesisir Selatan	69
Tabel 3.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025	77
Tabel 4.1	Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	115

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan tahapan kegiatan yang melibatkan unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan daerah/wilayah dalam waktu tertentu. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip, meliputi :

- a. Merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing
- c. Mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah
- d. Dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas : RPJPD, RPJMD dan RKPD, sedangkan Rencana Perangkat Daerah terdiri atas : RENSTRA Perangkat Daerah dan RENJA Perangkat Daerah.

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Pesisir Selatan yang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 138 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas

Perdagangan dan Transmigrasi yang kemudian diubah dalam Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang telah mencakup uraian tugas Jabatan Fungsional hasil penyetaraan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Selanjutnya untuk mendukung terwujudnya good governance, dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan tata pengelolaan pemerintahan yang baik salah satunya adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result oriented government). Dengan kata lain pemerintah lebih berfokus pada pencapaian kinerja yang lebih baik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah dalam periode satu tahun berjalan dengan efektif, efisien, dan tepat sasaran maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dituntut ikut berperan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi.

Berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk setiap tahun Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan membuat Rencana Kerja (RENJA) yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun. Dengan adanya RENJA ini, diharapkan sektor Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan dapat berperan secara optimal sebagai fasilitator dan katalisator dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Kerja satuan pemerintah daerah (RENJA-OPD) merupakan dokumen perencanaan satuan kerja pemerintah daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

1.1.2. Proses Penyusunan RENJA

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan RENJA OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan RENJA OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan RENJA OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan. Prinsip Penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 adalah :

1. Substansi RENJA merupakan materi Rancangan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang disesuaikan dengan Peraturan Bupati no 10 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025;
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan;

3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan dokumen resmi program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang akan dilaksanakan dalam tahun 2025;
5. Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2025 merupakan acuan dalam penyusunan RKA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

1.1.3 Keterkaitan Antara RENJA OPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja adalah penjabaran dari RENSTRA OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu. Karena sistem perencanaan pembangunan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya mulai dari dokumen RKPD, RENSTRA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026, RENJA Kementerian dan Lembaga terkait dengan Perindustrian, Perdagangan dan Transmigrasi, serta RENJA Provinsi Sumatera Barat.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3682), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 tahun 2016 tentang

9. Pembentukan dan susunan perangkat daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah No 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2010-2030 ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 185 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 173 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan adalah untuk :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
- b. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah yang mendasar.

Tujuan penyusunan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2025 adalah untuk memetakan kebutuhan berbagai sumber di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi selama 1 (satu) tahun ke depan secara jelas dan transparan yang akan digunakan sebagai acuan/pedoman dalam mewujudkan tujuan pembangunan di sektor perdagangan, perindustrian dan transmigrasi serta mempermudah melaksanakan kegiatan selama 1 (satu) tahun kedepan, sehingga sumber-sumber daya yang ada di masyarakat dapat dikelola secara baik dan optimal.

1.4 Sistematika

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Kerja Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

- 2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III Tujuan dan Sasaran Dinas Perdagangan Dan Transmigrasi
 - 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan
Transmigrasi
 - 3.3.. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
- BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan
Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan
- BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2023 dan Perkiraan Capaian RENSTRA Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada Tahun 2024

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja dilakukan dengan melakukan pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dengan menggunakan indikator masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

Pengukuran Kinerja Kegiatan didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran. Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perdagangan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2024 mengacu pada APBD tahun 2024. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dan realisasi Renstra mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan dan realisasi APBD Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana terlampir pada tabel 2.1.

Secara umum, garis besar pokok materi yang disampaikan pada tabel 2.1 adalah sebagai berikut :

1. Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 dibuat dengan asumsi bahwa seluruh target outcome/ program, output kegiatan dan output subkegiatan pada tahun 2024, tercapai 100%. Dengan asumsi tersebut diperkirakan hingga tahun 2024 capaian indikator program pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi bervariasi

dan masih ada yang dibawah 50%. Capaian terendah yaitu Jumlah Pasar Menuju SNI dengan capaian 33%. Target 2 (dua) pasar menuju SNI pada tahun 2024 belum dapat dicapai. Saat ini jumlah pasar menuju SNI adalah 1 (satu) pasar yaitu Pasar Rakyat Tapan. Pembangunan Pasar semi modern Painan yang direncanakan selesai di semester 2 tahun 2024 mundur hingga akhir tahun 2024, dan akan beroperasi pada tahun 2025. Capaian terendah berikutnya yaitu Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%) dengan capaian 50,33%. Rendahnya capaian ini disebabkan fluktuasi harga bahan pokok yang cukup tinggi sebagai dampak inflasi pada semester 2 (dua) tahun 2023, hingga tahun 2024 ini. Keadaan ini diperparah oleh dampak elnino yang berpengaruh pada harga bahan pokok di Kabupaten Pesisir Selatan

2. Pada tahun 2024 Program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi difokuskan pada penanganan inflasi, kemiskinan, penerapan TKDN, operasional sentra IKM dan pengamanan aset baik itu berupa aset pasar, sentra IKM maupun SHM transmigrasi
3. Kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang menjadi pertimbangan dalam penyusunan indikator input (anggaran) Renja tahun 2025 terkait hasil evaluasi tahun 2024 adalah : (1) Pelaksanaan kegiatan Operasi Pasar dan pemantauan harga perlu dilanjutkan sebagai langkah penanggulangan inflasi jangka menengah tingkat Kabupaten (2) Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan telah menjadi prioritas nasional dalam mendukung penerapan TKDN dan P3DN, oleh karena itu hal tersebut

akan menjadi prioritas dinas dalam penyusunan anggaran nantinya (3) Pembangunan, revitaliasasi dan rehabilitasi pasar rakyat akan terus dilanjutkan (4) Pengawasan dan legalitas distributor pupuk dan pestisida perlu ditingkatkan (5) Pengawasan peredaran barang berbahaya yang menjadi tanggung jawab dinas perlu dihidupkan kembali dan menjadi prioritas (6) Untuk menyikapi laporan rendahnya capaian kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB pada tahun 2022, maka pada tahun 2025 akan diupayakan langkah prioritas bidang perindustrian dengan mengoperasikan sentra-sentra IKM yang telah dibangun dengan didukung oleh sumber daya yang cukup, untuk itu kegiatan pendukung operasional sentra IKM akan menjadi prioritas (7) Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) dirasa tidak akurat dan *up to date* lagi untuk dijadikan acuan dalam Pembangunan Industri di Kabupaten Pesisir Selatan, oleh karena itu perlu dihidupkan kegiatan evaluasi RPIK dengan tujuan rasionalisasi target ataupun penyusunan Perda RPIK baru berdasarkan RPJPN dan RPJMN pemerintah baru serta RPJPD tahun 2025-2045 dan RPJMN 2025-2030 Kabupaten Pesisir Selatan (8) Peningkatan kapasitas SDM dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Transmigrasi akan terus dilanjutkan.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) /kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) hingga Tahun 2024		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022		Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangk at daerah tahun 2024 (n- 1)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realiasi capaian program dan kegiatan s/d TW II tahun 2024	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	60%	21.679.459.252	20%	9.189.308.639	20%	23%	113%	20%	63%	104,3%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
		Persen Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	60%		20%		20%	20%	100%	20%	60%	100,0%
		Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	57%		20%		19%	39%	206,3%	19%	78%	137,2%
		Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	12		6		3	1	33	3	10	83%
		Kategori keterbukaan informasi publik	95		40		20	20	100,0%	20	80	84%
	Administrasi keuangan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	48 dokumen	17.953.995.129	24 dokumen	7.755.018.114	12 dokumen	13 dokumen	108	12 dokumen	49	102%
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	1664 orang	17.371.190.939	912 orang	7.482.724.432	456 orang	416 orang	91	456 orang	1784	107%
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48 dokumen	582.804.190	16 dokumen	272.293.682	12 dokumen	17 dokumen	142	12 dokumen	45	94%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	60	794.662.601	NA	513.546.508	15	0	0	15	15	25%
		Persentase dokumen publik dan dipublish	58%		NA		19%	3%	15,79%	19,00%	22%	38,2%
		Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	10		3		5	5	100	5	13	130%
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	4 paket	20.328.856	2 paket	21.336.900	1 paket	1 paket	100	1 paket	4	100%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6 paket	174.442.715	6 paket	70.676.136	3 paket	3 paket	100	3 paket	12	200%
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	16 paket	82.281.761	16 paket	45.589.220	8 paket	8 paket	100	8 paket	32	200%
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	108 eksemplar	26.923.500	72 eksemplar	28.238.020	36 eksemplar	-	-	36 eksemplar	108	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	-	0		0	0		2 paket	2 paket	0%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	0		0	0		4 paket	4 paket	0%
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	48 laporan	52.702.120	24 laporan	42.985.400	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	48	100%
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	450 laporan	437.983.650	160 laporan	304.720.832	80 laporan	80 laporan	100	90 laporan	330	73%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	57%	1.081.366.374	19%	441.333.014	19%	19%	100%	19%	57%	100,0%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	704.213.104	24 laporan	285.911.714	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	48	133%
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	377.153.270	24 laporan	155.421.300	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	48	100%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	54%	1.221.688.733	18%	448.405.058	18%	18%	100%	18%	54%	100,0%
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	230.000.000	0		1 unit	1 unit	100	1 unit	1	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	313.781.358	11 unit	172.863.258	8 unit	4 unit	50	5 unit	20	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	68 unit	39.423.375	44 unit	18.265.000	14 unit	6 unit	42,86	24 unit	74	109%
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	10 unit	868.484.000	3 unit	257.276.800	4 unit	4 unit	100	2 unit	9	90,0%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang diperlihara/direhab	0 unit	-	0		0	0	0	0	0	0%
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	80 dokumen	280.000.000	26 dokumen	-	30 dokumen	34 dokumen	113,33	20 dokumen	80	100%
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56 laporan	130.000.000	18	-	23 laporan	23 laporan	460	16 laporan	57	102%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24 dokumen	150.000.000	8	-	15 dokumen	11 dokumen	73,33	4 dokumen	23	96%
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	2074 unit	117.746.415	300 unit	31.006.000	0	9	0	1085 unit	1085	52%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 laporan	-	0	-	0	0	0	3 dokumen	3	25%
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	20.000.000	0	-	0	0	100	3 laporan	3	100%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	54%	97.746.415	18%	31.006.000	36%	36%	100%	36%	36%	66,7%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	10 unit	97.746.415	4	31.006.000	5	1	100	6 unit	11	110%
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9%	764.916.761	8,89 %	103.088.250	<9%	5,27	50,44%	<9%	5,28	50,33%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	11%	257.314.084	3,79 %	39.456.250	3%	0,0%	-	3%	6,8%	63%
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	8 dokumen	110.966.500	2 dokumen	1.947.250	0 dokumen	0	0	0	2	25%
1	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	8 laporan	146.347.584	2 laporan	37.509.000	0	0	0	2 laporan	4	50%
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	54%	379.713.823	16%	23.173.000	18%	18,08%	100%	18%	53%	97%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	12 laporan	116.373.375	1 laporan	1.000.000	0 laporan	0 laporan	-	12 laporan	13	108%
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 laporan	263.340.448	2 laporan	22.173.000	3 laporan	1 laporan	33	2 laporan	5	42%
	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Daerah Kabupaten / Kota	Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	54%	127.888.855	16,50%	40.459.000	18%	18,08%	100%	18,00%	53%	97%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tk Agen dan Pasar Rakyat.	Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	8 laporan	127.888.855	1 laporan	40.459.000	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	3	38%
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	6 pasar	1.585.559.684	1 pasar	-	2 pasar	1 pasar	50	2 pasar	2	33%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,30%	1.585.559.684	0,06 %	-	0,020%	0,0%	100%	0,02%	0,104%	35%
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	2520 UTTP	1.543.294.890	420 UTTP	443.976.401	250 UTTP	250 UTTP	100,00	1500 UTTP	2170	86%
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1700 pelaku usaha	180.000.000	0		0	0	-	0	0	0%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	8%	1.405.559.684	1,97 %	-	2%	2%	100	2,00%	6%	74,6%
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	60 komo diti	1.405.559.684	20 kom oditi	-	20 komoditi	0	0	20 komodit i	40	67%
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kot a	40 UMK M	1.017.056.250	0	-	10 UMKM	0	-	10 UMKM	10 UMKM	25%
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	100 UMK M	339.018.750	0	-	0	0	-	25 UMKM	25 UMKM	25%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Peningkatan sistem jaringan dan jaringan informasi perdagangan	Jumlah Data dan Informasi Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	4 database	49.484.684	1 database	46.269.450	1 database	1 database	100	1 database	3	75%
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	8%	205.000.000	1,97 %	-	2%	2%	100%	2,00%	6%	74,6%
	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	20 produk	205.000.000	0	-	5 produk	5 produk	0	5 produk	10	50%
	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	10 pelaku usaha	307.500.000	0	-	0	-	-	0	0	0%
	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah Pelaku Usaha Ekspor yang Dibina	12 pelaku usaha	205.000.000	0	-	-	0	0	0	0	0%
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	6 Pasar	-	1 pasar	-	2 pasar	1 pasar	50	2 pasar	2	33%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	3.950.000.000	50 pasar	2.546.363.800	50 pasar	50 pasar	100	51 pasar	51	100%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		895 pedagang		915 pedagang	915 pedagang	100	935 pedagang	935	100%
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51 unit	3.950.000.000	50 unit	2.546.363.800	50 unit	50 unit	100	51 pasar	51	100%
		Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	6 pasar		5 pasar		1 pasar	2 pasar	200	1 pasar	8	133%
1	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pasar Rakyat	51 pasar	2.553.042.625	50 pasar	1.116.594.300	50 pasar	50 pasar	100,00%	51 pasar	51	100%
		Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	935 pedagang		895 pedagang		915 pedagang	915 pedagang	100,00%	935 pedagang	935	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	44 dokumen	2.553.042.625	23 dokumen	1.116.594.300	12 dokumen	12 dokumen	100	11 dokumen	46	105%
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60,00 %	-	NA	-	57%	0,0%	0,0%	57%	57%	95%
1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	22 izin	128.307.630	NA	-	6 izin	0	0	6 izin	6	27%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha erintegrasi Secara Elektronik	4 reko mend asi	94.300.000	NA	-	5 rekomend asi	0	0	1 rekomen dasi	1	25%
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui SIsstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulak an dan toko swalayan melalui SIsstem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	16 lapor an	34.007.630	0	-	1 laporan	0	0	1 laporan	1	6%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	20 kali	51.250.000	0	-	0	0	0	5 kali	5	25%
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	12 laporan	51.250.000	0	-	3 izin	0	0	3 laporan	3	25%
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	18%	-	10,49%	-	5%	11,01%	220%	5,00%	26,50%	147%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	21321 orang		13797 orang		19541 orang	14459 orang	74	21321 orang	21321	100%
		Pertambahan jumlah IKM	9%	53.179.937.057	28,15%	30.169.810.322	8,0%	1,3%	0	9,00%	38,48%	428%
		Jumlah Sentra IKM	3 unit		1		2	2	100	3	3	100%
		Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	235 produk		27		160	102	63,75	25	154	55%
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	25.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	25 dokumen	822.235.931	5	169.232.500	6	6	100	5 dokumen	16	64%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	12 dokumen	2.106.600.000	2	51.904.000	1	2	200	4 dokumen	8	67%
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	48 dokumen	50.251.101.126	4	29.948.673.822	12	12	100	12 dokumen	28	58%
	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri								0 dokumen		0%
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	9,12%	-	4,66 %	-	3%	4,59%	155%	3,00%	12,25%	134%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100%	615.131.622	54,2 3%	125.244.500	20%	9,10%	0	20%	83,33%	83%
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	24 doku men	120.278.500	122	51.591.450	12 dokumen	3 dokumen	25,0	12 dokumen	137	563%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	16 dokumen	55.250.000	1		0	0	0	3 dokumen	4	25%

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	18,0 %	559.881.622	10,4 9%	125.244.500	5%	11,01%	220%	5,00%	26,5%	147%
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100 %	559.881.622	65%	125.244.500	20,0%	65%	65%	20%	150%	150,00%
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	60 dokumen	252.381.622	2 dokumen	125.244.500	1 dokumen	1 dokumen	100	15 dokumen	18	30%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 dokumen	307.500.000	0		15	0	0	2 dokumen	2	13%
	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah kawasan transmigrasi yang difasilitasi penetapannya	1 kawasan	145.000.000	0	-	0	0	0	0 kawasan	0	0%
	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Luas tanah yang dicadangkan untuk pembangunan kawasan transmigrasi	500 hektar	95.000.000	0	-	0	-	0	0 kawasan	0	0%
		Fasilitasi HPK menjadi APL untuk Transmigrasi lokal (Hektar)	0		0		-	0	0	0	0	0%
	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerja Samakan dengan Daerah Lain	1 dokumen	45.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 kasus	50.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
	Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Luas Tanah untuk Pembangunan Kawasan Transmigrasi	500 hektar	50.000.000	0	-	0	0	0	0 hektar	0	0%
	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah pemukiman transmigrasi yang difasilitasi pembangunannya	1 pemukiman	-	0	-	0	0	0	0 pemukiman	0	0%
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah permukiman yang ditata	1 pemukiman	-	0	-	0	0	0	0	0	0%
		Jumlah KK di pemukiman baru	200 KK		0		0	0	0	0	0	0%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penyiapan Lingkungan Hunian Fisik, Sosial, Ekonomi bagi Penduduk Setempat dan Transmigran	Jumlah Pelaporan Kelayakan Lingkungan dan Permukiman Transmigrasi (yang Memenuhi Kriteria Layak Huni, Layak Usaha dan Layak Berkembang)	1 laporan	30.000.000	0	-	0	0	0	0	0	0%
1	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Dipindahkan dan Ditempatkan	0 transmigran	0		-	0		0	0	0	0%
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah lembaga di kawasan transmigrasi	50 lembaga	-	48	-	49	48	97,96	50 lembaga	50	100%
		Jumlah sarana dan prasarana di kawasan transmigrasi	45 unit		43		44	43	97,7	45 unit	45	100%
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun (fasilitasi SHM)	4 unit	4.900.499.539	2	2.759.721.156	1	0	0	4 unit	6	150%
1		Jumlah satuan permukiman yang dibina	2 pemukiman		2 pemukiman		2 pemukiman	2 pemukiman	100	2 pemukiman	2 pemukiman	100%

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025

1	2	3	4		5		6	7	8 (7/6)	9	10 = 5+7+9	11 = (10/4)
	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	80 KK	725.499.647	20	134.383.350	60	0	0	40 KK	60	75%
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 pemukiman	4.174.999.892	2 pemukiman	2.625.337.806	2 pemukiman	2 pemukiman	100	2 pemukiman	2 pemukiman	100%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD yang menjalankan fungsi Urusan Pemerintah Pilihan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu urusan bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Namun demikian, dalam menjalankan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Transmigrasi merupakan OPD kunci dalam penyelenggaraan urusan yang berkaitan dengan Perekonomian Daerah yang terlihat pada kontribusi sektor Industri dan sektor Perdagangan yang cukup besar terhadap PDRB. Sehubungan dengan ini, penyelenggaraan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 diarahkan pada pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi didasarkan pada target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran terhadap masing-masing Indikator Kinerja Kunci (IKK) RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, yang menjadi ruang lingkup Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Review terhadap hasil capaian kinerja pelayanan IKK Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun lalu ($n-2$) dan proyeksi capaian tahun berjalan (tahun $n-1$), tahun n dan tahun $n+1$ mengacu pada target IKK yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2021-2026. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan tahun serta proyeksi tahun yang akan datang dapat dilihat pada tabel 2.2 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	
				(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	(TH N-2)	(TH N-1)	(TH N)	(TH N+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah		√	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	8,00%	9,00%	9,00%	9,00%	
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK		√	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	25,00%	30,00%	35,00%	40,00%	
3	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini		√	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)		√	57%	60%	60%	65%	57%	60%	60%	65%	
6	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)		√	17,0%	18,0%	19,0%	20,0%	17,0%	18,0%	19,0%	20,0%	
7	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku		√	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	0,48%	0,50%	0,53%	0,55%	
8	Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi		√	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	52 lembaga	49 lembaga	50 lembaga	51 lembaga	52 lembaga	

2.3. Isu Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat ditentukan beberapa isu strategis terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan antara lain :

1. Peningkatan omset perdagangan komoditi daerah

Pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB Kabupaten Pesisir Selatan dipengaruhi oleh aktifitas perdagangan dalam negeri. Untuk mendorong pertumbuhan sektor perdagangan dalam PDRB diperlukan peningkatan omset pelaku usaha perdagangan dalam negeri. Saat ini permasalahan yang dihadapi pelaku usaha perdagangan dalam negeri antara lain :

- a. Keterbatasan akses pasar dan jaringan pemasaran;
- b. Sarana dan prasarana perdagangan masih kurang;
- c. Rendahnya kapasitas SDM pelaku usaha perdagangan yang meliputi :
Kewirausahaan, motivasi dan manajemen bisnis
- d. Inflasi yang menyentuh semua lini sektor usaha

Berbagai aktivitas Dinas Perdagangan dan Transmigrasi dalam rangka peningkatan perdagangan dalam negeri perlu dilakukan antara lain:

- a. Pemasaran produk
- b. Rehab dan peningkatan sarana perdagangan
- c. Pembinaan pelaku usaha perdagangan dalam negeri
- d. Pembinaan dan pengawasan serta koordinasi pengawasan barang beredar,
jasa dan tertib niaga

- e. Menjamin ketersediaan dan stabilitas harga bahan kebutuhan pokok dan barang penting.
- f. Mendorong promosi dan jejaring pemasaran serta penggunaan produk-produk lokal melalui partisipasi aktif dalam program/ kebijakan nasional mengenai TKDN dan P3DN
- g. Upaya penanggulangan inflasi dengan melalui kegiatan operasi pasar (penanggulangan jangka pendek), pemantauan harga dan pengendalian ketersediaan bahan pokok (penanggulangan jangka menengah dan panjang)

2. Peningkatan nilai tambah produk IKM

Daya saing produk IKM Kabupaten Pesisir Selatan dapat dikatakan cukup rendah dibandingkan dengan produk IKM kabupaten lain di Sumatera barat, hal ini terlihat belum banyaknya produk IKM yang menembus pasar dalam negeri, luar negeri. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah rendahnya kualitas produk terutama produk pangan, kerajinan rotan, kerajinan kulit dan tas, sulaman dan bordir dan lainnya. Produk yang berkualitas dan berdaya saing dapat dicapai dengan perbaikan proses produksi, yang pada akhirnya meningkatkan nilai tambah industri.

Dalam rangka peningkatan nilai tambah tersebut, pemerintah daerah menfokuskan pembinaan pada sektor unggulan terutama yang telah dirancang dalam Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dalam hal ini, upaya yang dilakukan yaitu melaksanakan program dan kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pelatihan teknis dan manajemen, standarisasi dan sertifikasi produk IKM, serta membangun kemitraan dengan swasta/ BUMN/BUMD, lembaga pengujian dan desain produk serta perguruan tinggi. ,
2. Penyediaan sarana dan prasarana melalui bantuan peralatan produksi pada kelompok IKM potensial,
3. Pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan kelompok-kelompok IKM melalui fasilitasi pembangunan sentra IKM unggulan
4. Mendorong tumbuh dan berkembangnya produksi produk lokal unggulan dalam rangka mewujudkan program nasional TKDN dan P3DN.

3. Kemandirian Lembaga dan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi

Kemandirian lembaga dan infrastruktur kawasan transmigrasi di Kabupaten Pesisir Selatan ditentukan oleh 2 (dua) hal yaitu :

1. Jumlah lembaga ekonomi, sosial dan budaya yang aktif dan mandiri secara finansial di Kawasan transmigrasi
2. Jumlah sarana prasarana pendukung aktivitas perekonomian masyarakat transmigrasi.

Untuk mewujudkan kemandirian ini diperlukan sinergitas beberapa aspek. Namun dalam perkembangannya, terdapat beberapa kendala yang ditemui antara lain : Belum optimalnya kinerja lembaga masyarakat di kawasan transmigrasi

- a. Belum optimalnya pengelolaan Kota Terpadu Mandiri (KTM)

Lunang Silaut.

- b. Masih kurangnya pengelolaan dan pengembangan bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, kelautan, perikanan dan perkebunan di kawasan transmigrasi
 - c. Masih kurangnya pemahaman masyarakat transmigran terhadap peduli lingkungan terutama untuk menjaga hutan lindung dan lahan gambut
3. Kurangnya pemanfaatan sarana, prasarana/ infrastruktur di kawasan transmigrasi

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) adalah memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, indikator dan target capaian serta pagu indikatif untuk masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan. Analisa terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dalam rangka menelaah kebutuhan program, kegiatan, subkegiatan serta pagu indikatif berdasarkan efesiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan untuk kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat pada tabel 2.3.

Tabel 2.3
 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Rancangan Awal					Hasil Analisis Kebutuhan					CATATAN PENTING
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SEKRETARIAT					SEKRETARIAT					
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	6.798.658.159	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	100%	6.309.218.351	
			Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan				Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	0 delay laporan		
			Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	95%				Persentase Kinerja Bidang yang tercapai	95%		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1				Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	1		
			Kategori keterbukaan informasi publik	95				Kategori keterbukaan informasi publik	95		
	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 dokumen	5.222.882.173	Administrasi keuangan perangkat daerah		Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan	12 dokumen	5.223.218.351	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456	5.063.218.351	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (orang. Bulan)	456	5.063.218.351	
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	159.663.822	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	160.000.000	
	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15	258.148.699	Administrasi umum Perangkat Daerah		Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti	15	181.000.000	
			Persentase dokumen publik dan dipublish	97%				Persentase dokumen publik dan dipublish	97%		
			Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5 orang				Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang)	5 orang		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	5.245.338	Penyediaan komponen instalasi listerik/ penerangan bangunan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1	3.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	36.520.545	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	20.000.000	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	18.064.727	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	8	15.000.000	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	6.251.175	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36	-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	21.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	0	20.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai , Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	36.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	0	-	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	4.824.981	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	7.500.000	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	129.491.933	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	80	115.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95%	306.141.257	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	95%	455.000.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai , Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	186.042.328	Penyediaan jasa Komunikasi ,sumber daya air dan listrik	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	350.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	120.098.929	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	IV Jurai, Koto XI Tarusan, Lunang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	105.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	685.092.709	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90%	315.000.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	57.500.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional jabatan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1	60.000.000	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	82.479.890	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Pesisir Selatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	9.666.169	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	14	5.000.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	4	335.446.650	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/rehab	4	200.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	0	200.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang dipelihara/direhab	0	-	
	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 dokumen	220.500.000	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	20 dokumen	75.000.000	
	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	136.500.000	Evaluasi kinerja perangkat daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	25.000.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	84.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	15	50.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	1085 unit	70.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	1085 unit	20.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	50.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 dokumen	20.000.000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	20.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 dokumen	-	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	35.893.321	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	90	40.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	35.893.321	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	IV Jurai, Pesisir Selatan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	3 unit	40.000.000	
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9	193.907.700	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9	172.818.700	
3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	19,00%	86.823.800	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tk Daerah Kabupaten/ Kota		Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	19,00%	70.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	44.100.000	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	1 dokumen	25.000.000	
	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	42.723.800	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	2 laporan	45.000.000	
	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90	107.083.900	Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten/Kota		Persentase rata rata ketersediaan stock bahan kebutuhan pokok dipasar rakyat dan bahan kebutuhan penting lainnya	90	102.818.700	
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	32.818.700	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 laporan	32.818.700	
	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	4 laporan	74.265.200	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang berdampak dalam 1(satu) Kabupaten / Kota.	Pesisir Selatan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/ Kota	4 laporan	70.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	650.000.000	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	350.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,53%	650.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan		Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	0,53%	350.000.000	
	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250	530.000.000	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	Pesisir Selatan	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	250	300.000.000	
	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 pelaku usaha	120.000.000	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1000 pelaku usaha	50.000.000	
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	729.303.751	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	375.000.000	
	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 produk/ komoditi	729.303.751	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran, dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	20 produk/ komoditi	375.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	546.977.813	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri ditingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melaksanakan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	10 UMKM	300.000.000	
	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	182.325.938	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	10 UMKM	75.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	275.625.000	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2%	150.000.000	
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5	275.625.000	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan misi dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah jenis produk dan komoditi potensial ekspor	5	150.000.000	
	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	165.375.000	Pameran Dagang Nasional	Pesisir Selatan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	5	100.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 produk	110.250.000	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Pesisir Selatan	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi	5 produk	50.000.000	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	9.311.731.720	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar	1.140.000.000	
	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51	8.600.000.000	Pembangunan dan Pengelolaan sarana distribusi perdagangan		Jumlah Pasar Rakyat	51	760.000.000	
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	955				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	955		
	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51	8.600.000.000	Penyediaan sarana Distribusi perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	51	260.000.000	
			Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1				Jumlah pasar rakyat yang dibangun / direvitalisasi	1		
						Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	15 unit	500.000.000	
	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51	711.731.720	Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Pasar Rakyat	51	380.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	955				Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	955		
	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	711.731.720	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 dokumen	380.000.000	
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60%	153.277.500	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60%	100.000.000	
	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 izin	95.715.000	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 izin	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 rekomendasi	30.715.000	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	6 rekomendasi	-	
	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	65.000.000	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	Pesisir Selatan	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	1 laporan	40.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 izin	27.562.500	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	6 izin	30.000.000	
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 dokumen	27.562.500	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	1 dokumen	30.000.000	
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5 kali	30.000.000	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	5 kali	30.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 laporan	30.000.000	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	Pesisir Selatan	Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	3 laporan	30.000.000	
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	35%	1.500.000.000	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	35%	950.000.000	
	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9%	1.500.000.000	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota		Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	9%	950.000.000	
			Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	23432				Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri	23432		
			Jumlah Sentra IKM	3				Jumlah Sentra IKM	3		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25				Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk)	25		
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 revisi RPIK	100.000.000	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Pesisir Selatan	Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	1 revisi RPIK	-	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 dokumen	750.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sumber Daya Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	6 dokumen	500.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	150.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 dokumen	100.000.000	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 dokumen	500.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	12 dokumen	250.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 dokumen	100.000.000	
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	16,20	56.503.125	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA		Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	16,20	56.000.000	
	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	56.503.125	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)		Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	56.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 dokumen	28.940.625	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	Pesisir Selatan	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	12 dokumen	28.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	27.562.500	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kewenangan Kabupaten/Kota Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	1 dokumen	28.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	25%	240.388.961	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	25%	178.000.000	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	240.388.961	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota		Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	100%	178.000.000	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	75.013.961	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 dokumen	28.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 dokumen	165.375.000	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi Industri Kabupaten/ Kota	Pesisir Selatan	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas	15 dokumen	150.000.000	
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	51 lembaga	2.907.580.000	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	51 lembaga	450.000.000	
			Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	46 unit				Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi	46 unit		
	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	2.907.580.000	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan (Satu) Daerah Provinsi		Jumlah sarana dan prasarana yang dibangun	1 unit	450.000.000	
			Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 satuan permukiman				Jumlah satuan permukiman yang dibina	1 satuan permukiman		
	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 KK	235.580.000	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	100 KK	250.000.000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	2.672.000.000	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Lunang, Silaut	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	1 satuan permukiman	200.000.000	
	Total				22.816.975.916	Total				10.231.037.051	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dengan pertimbangan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan memperhatikan hasil MUSRENBANG mulai dari tingkat nagari/desa yang ditindak lanjuti sampai dengan tingkat kabupaten, responsif terhadap permasalahan serta isu-isu strategis, efisien dalam perencanaan anggaran dan efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian rencana kerja ini tidak hanya memenuhi kepentingan perangkat daerah saja melainkan juga dapat menjawab permasalahan yang ada di masyarakat khususnya terkait dengan urusan Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi.

Usulan kegiatan dari masyarakat yang tertuang dalam rancangan rencana kerja didiskusikan dalam pembahasan forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrebang Kecamatan. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan forum OPD.

Berdasarkan kepada Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 yang merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, terdapat 3 (tiga) usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan yang disampaikan pada Musrebang dan Forum OPD dapat diakomodir oleh Dinas Perdagangan dan Transmigrasi pada tahap perencanaan. Usulan tersebut terdapat pada tabel 2.4.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan/Pagu	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN / Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Balai Salasa, Ranah Pesisir	Terlaksananya Revitalisasi Pasar Balai Selasa	1 Unit	1.000.000.000	Musrembang
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN / Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pasir Binjai, Silaut	Terlaksananya Pembangunan sarana dan prasarana pasar	1 Unit	800.000.000	Musrembang
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN / Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Subkegiatan : Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Air Haji, Linggo Sari Baganti	Terlaksananya Rehab Pasar Kamis Air Haji	1 Unit	2.500.000.000	Musrembang

1	2	3	4	5	6	7
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Muara Indrapura, Kec. Pancung Soal	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas IKM	1 paket	100.000.000	Musrembang
	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
5	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Indrapura utara, Pancung Soal	Terlaksananya Pengelolaan dan Pengolahan Pupuk Kompos	1 paket	100.000.000	Musrembang
	Subkegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Rencana Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat					
6	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Tluk Kualo Indrapura, Pancung Soal	Terlaksananya Pengadaan Sarana-Prasarana IKM Lokanesia	1 paket	150.000.000	Musrembang
	Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri					

1	2	3	4	5	6	7
7	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI/ Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Subkegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Limau Gadang Lumpo, IV Jurai	Terlaksananya Diversifikasi produk Kuliner Tradisonal Nagari Limau Gadang Lumpo	1 paket	250.000.000	Musrembang

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

3.1. Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi mengacu pada dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

- a. Industrialisasi menjadi salah satu Misi Presiden Wakil Presiden 2025- 2029
Terpilih yaitu Misi ASTA CITA ke 5 :

Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Dengan 5 (lima) kerangka strategi industri nasional, 2 (dua) diantaranya diperuntukkan bagi Pengembangan Industri Daerah, yaitu :

1. Aglomerasi Industri di Kawasan Industri (KI)/ Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
2. Penguatan IKM sebagai rantai pasok

Pada tahun 2025, Kabupaten Pesisir Selatan termasuk ke dalam wilayah pengembangan ekosistem dan rantai pasok Kawasan Industri (KI) Sei Mangkei dan menjadi prioritas DAK Non Fisik Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM) tahun 2025.

- b. Penerapan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 - 2035

Sasaran Pembangunan Industri Nasional yang terdapat pada RIPIN 2015-2035 adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
2. meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
3. tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
4. meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
5. meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
6. meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
7. menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

c. Kebijakan Nasional terkait Inflasi

Sasaran inflasi nasional tahun 2025 telah ditetapkan melalui peraturan menteri keuangan nomor 31 tahun 2024 yaitu sebesar 2,5 %. Untuk mewujudkan hal ini, Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah menetapkan kebijakan nasional melalui alokasi fiskal pusat dan daerah dalam

pelaksanaan 9 (sembilan) langkah konkrit pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi, yaitu :

1. Melakukan pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia
2. Melaksanakan rapat teknis tim pengendalian inflasi daerah
3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting
4. Melaksanakan Penganjangan gerakan menanam
5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait
6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang
7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan
8. Merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) untuk dukungan pengendalian inflasi
9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi

Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2021-2026 dan Rasionalisasi Renstra Dinas Perdagangan dan Transmigrasi hasil revidi RPJMD tahun 2022. Kesesuaian indikator tujuan dan sasaran pada Renstra dengan rencana prioritas yang akan dicapai pada tahun 2024 menjadi acuan dalam penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi tahun 2024.

a. Tujuan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai Visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi pada jangka waktu 5 (lima) tahun seperti yang telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026. Tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Terwujudnya Pemerintah yang Akuntabel dan Berkinerja
2. Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3. Meningkatnya Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

b. Sasaran.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat terukur.

Adapun Sasaran Dinas Perdagangan dan Transmigrasi adalah :

1. Terwujudnya Pemerintahan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi yang akuntabel dan berkinerja
2. Meningkatnya Kualitas Inovasi Daerah
3. Meningkatnya kemandirian Kawasan Transmigrasi
4. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan (Industri dan Perdagangan)

3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas. Menentukan skala prioritas didasarkan pada urutan kegiatan yang bersifat rutin/ mengikat, karakteristik OPD dan prioritas daerah, guna mewujudkan efektivitas Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan. Rencana Program dan Kegiatan dan perkiraan maju tahun 2026 selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Perkiraan Maju Tahun 2024
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
Tahun 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAA N CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELO MPO K SASA RAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI						8.616.297.408							0,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						8.576.248.828							0,00	
	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN						6.946.248.828							0,00	
1.	3.30.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Persentase Kinerja Bidang yang tercapai Kategori keterbukaan informasi publik	100 % 100 %			0 delay laporan 100 % 1 inovasi 95 % 95 poin	4.704.769.494						100 % 100 %	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	<i>Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi</i>	-			20 dokumen	50.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIG RASI
	3.30.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PEND APAT AN ASLI DAER AH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan k am Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIG RASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				14 Laporan	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan yang dilaporkan				12 dokumen	3.702.079.494,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				38 Orang/bulan	3.492.079.494,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	210.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang diinventarisasi	-			1085 unit	20.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD				3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
3.30.01.2.03.0006			Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0 Laporan	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pengaduan/saran yang ditindaklanjuti Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas (orang) Persentase dokumen publik dan dipublish				15 pengaduan 5 orang 97 %	181.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	3.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	20.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				8 Paket	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				0 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Tra nsformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				12 Laporan	7.500.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				80 Laporan	115.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				90 %	30.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jumlah pelayanan umum yang terselenggara dengan baik pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi	-			95 %	455.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	105.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN Asli DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik				90 %	266.690.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhan Kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.09.001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	61.690.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.09.006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				14 Unit	5.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.01.2.09.009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				4 Unit	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Painan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transmigrasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2: Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	ASN Dinas Perdagangan dan Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
2.	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (Pasar rakyat, Toko Swalayan, Waralaba)	60 %			60 %	100.000.000,00						60 %	0,00	
	3.30.02.2.01	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal) Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin sesuai dengan Ketentuan (IUPP / SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM / IUTS / SIUP Toko Swalayan)	-			6 izin 62 %	55.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.02.2.01.001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				0 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.02.2.01.0002	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik														
			Jumlah laporan hasil pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik				1 laporan	40.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.03	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Izin Usaha Perdagangan (Pasar rakyat, Pusat perbelanjaan, waralaba, Tanda Daftar Gudang, Surat Keterangan Asal)	-			6 izin	15.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.02.2.03.002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri														
			Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT AN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.02.2.06	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pemantauan dan pengawasan terhadap distribusi produk dan bahan beresiko dan berbahaya	-			5 kali	30.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Distributor B2, Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)				3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
3.	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 Pasar			2 Pasar	1.034.600.000,00						2 Pasar	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.03.2.01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pasar Rakyat	-			51 Pasar	884.600.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.03.2.01.001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan														
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan				51 Unit	260.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Ranah Pesisir, Pasisia Pelangai Kab. Pesisir Selatan, Koto XI Tarusan, Barung-Barung Balantai Kab. Pesisir Selatan, Linggo Sari Baganti, Air Haji Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Silaut	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.03.2.01.002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				15 Unit	624.600.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat (Yang menempati Petak)	-			955 pedagang	150.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.03.2.02.001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan				12 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
4.	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting (%)	<9 %			<9 %	172.818.700,00						<9 %	0,00	
	3.30.04.2.02	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Persentase kinerja realisasi pupuk (%)	-			19 %	102.818.700,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.04.2.02.0002	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan				1 Laporan	32.818.700,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT Asli DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
3.30.04.2.02.003		Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota				4 Laporan	70.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPAT Asli DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.04.2.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	-			2 laporan	70.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.04.2.03.001	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan														
			Jumlah Dokumen Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan				1 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.04.2.03.003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%				2 Laporan	45.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
5.	3.30.05	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2 %			2 %	209.060.634,00						2 %	0,00	
	3.30.05.2.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			20 produk/komoditi	209.060.634,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.05.2.01.002	Pameran Dagang Nasional														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang				5 Pelaku Usaha	159.060.634,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.05.2.01.005	Peningkatan Citra Produk Ekspor														
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun Menjadi Materi Promosi				2 Produk	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
6.	3.30.06	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Jumlah Pasar Rakyat menuju kriteria SNI	2 pasar			2 pasar	350.000.000,00						2 pasar	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.30.06.2.01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan Lainnya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	-			0,53 %	350.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.06.2.01.001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang														
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang				250 Unit	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.06.2.01.002	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina				20 Orang	50.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDATA ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
7.	3.30.07	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Peningkatan jumlah omset komoditi dan produk unggulan daerah	2 %			2 %	375.000.000,00						2 %	0,00	
	3.30.07.2.01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah produk dan komoditi yang difasilitasi program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	-			20 produk/ komoditi	375.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.07.2.01.005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota				10 UMKM	300.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.30.07.2.01.0006	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi				10 UMKM	75.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku Usaha Perdagangan		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN						1.280.000.000,00							0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.31.02	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	35 %			35 %	1.046.000.000,00						35 %	0,00	
	3.31.02.2.01	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Produk yang bersertifikat (Halal, TKDN, MD-BPOM, HCCP/ CPPOB, HKI, SNI) (produk) Jumlah Sentra IKM Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pertambahan jumlah Industri Kecil dan Menengah	-			25 produk 3 sentra 23432 orang 9 %	1.046.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	0,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				6 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Des a Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Lumpo	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				3 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Pancung Soal, Semua Kel/Des a	PEN DAP ATA N ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				12 Dokumen	346.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Pancung Soal, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Ranah Pesisir, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Sutera, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.02.2.01.0006	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri														
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri				1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
2.	3.31.03	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Pelaku IKM yang memperoleh Izin sesuai ketentuan (IUI/ NIB)	-			16,2 %	56.000.000,00						-	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	3.31.03.2.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	-			100 %	56.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota														
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.03.2.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				12 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
3.	3.31.04	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RPIN yang ditetapkan dalam RPIK	35 %			35 %	178.000.000,00						35 %	0,00	
	3.31.04.2.01	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya Informasi Industri secara lengkap dan terkini	-			100 %	178.000.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM	-	0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	3.31.04.2.01.0001	Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)				1 Dokumen	28.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANS MIGRASI
	3.31.04.2.01.0002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas														
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas				15 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PEN DAP ATAN ASLI DAE RAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis Digital Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Pelaku IKM		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANS MIGRASI
	3.32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI						350.000.000,00							0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	3.32.04	PROGRA M PENGEM BANGAN KAWASA N TRANSMI GRASI	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat di kawasan transmigrasi Jumlah lembaga ekonomi dan sosial di kawasan transmigrasi	35 lembaga 22 unit			46 unit 51 lembaga	350.000.000 ,00						35 lembaga 22 unit	0,00	
	3.32.04.2.01	Pengemba ngan Satuan Permukim an pada Tahap Kemandiri an	Jumlah sarana dan prasarana ekonomi, sosial dan budaya masyarakat yang dibangun Jumlah satuan pemukiman yang dibina	-			1 unit 1 pemukiman	350.000.000 ,00			Mengemba ngkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin P emerataan	Meningkatk an pemban gunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkela njukan Prioritas 3: Peningkatan kesejahte raan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, p eningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan k esempatan kerja.	Masyarakat Transmigrasi	-	0,00	DINAS PERDAGANG AN DAN TRANSMIGR ASI
	3.32.04.2.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														
	3.32.04.2.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan				1 Satuan Permukiman	200.000.000,00	Kab. Pesisir Selatan, Lunang, Semua Kel/Desa Kab. Pesisir Selatan, Silaut, Semua Kel/Desa	PEN DAP, ATAN, ASLI DAE RAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan Prioritas 3: Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan, peningkatan nilai tambah komoditi serta perluasan kesempatan kerja.	Masyarakat Transmigrasi		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	X	NON URUSAN						40.048.580,00							0,00	
	X.XX	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX						40.048.580,00							0,00	
1.	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Ketepatan waktu pelaporan dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Persentase Kelengkapan Pelaporan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Jumlah Inovasi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Persentase Kinerja Bidang yang tercapai Kategori keterbukaan informasi publik	100 % 100 %			0 delay laporan 100 % 1 inovasi 95 % 95 poin	40.048.580,00						100 % 100 %	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase kondisi sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik	-			90 %	40.048.580,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	X.XX.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				8 Unit	40.048.580,00	Kab. Pesisir Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a Kab. Pesisir Selatan, IV Jurai, Semua Kel/Des a	PEN DAP Selatan, ATAN, DAE RAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Prioritas 2 :Peningkatan pelayanan publik melalui fokus reformasi birokrasi, e-government dan kemudahan investasi.	-		0,00	DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI
	J U M L A H							8.616.297.408,00								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERDAGANGAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN PESISIR SELATAN

Program Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Transmigrasi. Rencana program prioritas beserta indikator outcome/program sebagaimana tercantum dalam RPJMD, selanjutnya dijabarkan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Pemilihan kegiatan untuk masing-masing program prioritas ini didasarkan atas strategi dan kebijakan Dinas Perdagangan dan Transmigrasi. Kegiatan yang dipilih untuk setiap program prioritas, diharapkan dapat menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran program yang telah direncanakan. Indikator kinerja dipergunakan sebagai data dan informasi dasar untuk melakukan identifikasi masalah, menentukan kebijakan, merencanakan anggaran, memberikan peringatan dini terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan program kebijakan, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Pendanaan indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pendanaan

indikatif selanjutnya akan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Pencapaian target kinerja program (outcome) sebenarnya tidak hanya didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Pesisir Selatan namun juga oleh sumber pendanaan lainnya (APBN). Rencana program, kegiatan, dan pendanaan indikatif tahun 2024 Dinas Perdagangan dan Transmigrasi terdapat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program/Kegiatan dan Pendanaan Perubahan Tahun 2025
Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Pagu Renja 2025
1	2		3
I	SEKRETARIAT		4.744.818.074
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.744.818.074
	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.702.079.494
	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.492.079.494
	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	210.000.000
	2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	181.000.000
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.500.000
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20.000.000
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000
	4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-
	5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.500.000
	6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	115.000.000
	7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	20.000.000
	3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	30.000.000
	1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
	4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	455.000.000
	1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	350.000.000
	2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105.000.000
	5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.738.580
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan	61.690.000

1	2		3
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	40.048.580
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5.000.000
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200.000.000
	6	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	50.000.000
	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.000.000
	2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.000.000
	7	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000
	1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	20.000.000
	2	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-
II	URUSAN PERDAGANGAN		2.241.479.334
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		1.034.600.000
	1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	884.600.000
	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	260.000.000
	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	624.600.000
	2	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	150.000.000
	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	150.000.000
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		172.818.700
	1	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	102.818.700
	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	32.818.700
	2	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	70.000.000
	2	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	70.000.000
	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	25.000.000
	2	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	45.000.000
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		100.000.000
	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Dan Izin Usaha Toko Swalayan	55.000.000

1	2		3
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	15.000.000
	2	Fasilitasi pembinaan dan pemantauan kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk distributor, agen, grosir/ perkulakan dan toko swalayan melalui Sistem Perizinan Berusaha melalui Sistem Elektronik	40.000.000
	2	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	15.000.000
	1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	15.000.000
	3	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	30.000.000
	1	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	30.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR		209.060.634
	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	209.060.634
	1	Pameran Dagang Nasional	159.060.634
	2	Peningkatan Citra Produk Ekspor	50.000.000
	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		375.000.000
	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	375.000.000
	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	300.000.000
	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	75.000.000
	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN		350.000.000
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	350.000.000
	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	300.000.000
	2	Pengawasan/ Penyuluhan Metrologi Legal	50.000.000
III	BIDANG PERINDUSTRIAN		1.280.000.000
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI		1.046.000.000
	1	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	1.046.000.000
	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	-
	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	500.000.000
	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	100.000.000
	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	346.000.000
	5	Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	100.000.000

1	2		3
	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI		56.000.000
	1	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	56.000.000
	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	28.000.000
	2	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	28.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL		178.000.000
	1	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	178.000.000
	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	28.000.000
	2	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/ Kota Melalui SIINas	150.000.000
IV	BIDANG TRANSMIGRASI		350.000.000
	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI		350.000.000
	1	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian	350.000.000
	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	150.000.000
	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Permukiman	200.000.000
TOTAL			8.616.297.408

BAB V

PENUTUP

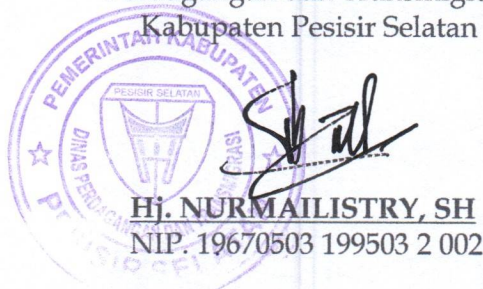
Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Rencana Kerja ini akan dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan dalam menjalankan tugas dan fungsi serta sebagai acuan dalam menyusun program/kegiatan tahun 2025.

Penyusunan Renja didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renja setiap tahun dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi dan *feed back* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Tahun 2025 ini disusun, dan disadari masih banyak kelemahan dan kekurangan-kekurangan, kami berharap adanya kritik dan saran yang membangun demi peningkatan pelayanan umum kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinas

Perdagangan dan Transmigrasi
Kabupaten Pesisir Selatan



Hj. NURMAILISTRY, SH
NIP. 19670503 199503 2 002